

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
NOMOR 591/KN/2022

TENTANG

STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2022-2026

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan optimalnya modal teknologi informasi sesuai kondisi yang dikehendaki dalam *Roadmap* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2019-2028 (*Roadmap to a Distinguished Asset Manager*), perlu disusun rencana tindak (*action plan*) jangka panjang bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- b. bahwa sesuai Diktum KESEPULUH Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/2021 tentang Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan Tahun 2021-2024, Unit TIK Eselon I menyusun strategi TIK tingkat unit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 836);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/2021 tentang Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2022-2026.

- PERTAMA : Menetapkan Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (TIK DJKN) Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Strategi TIK DJKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan rencana tindak (*action plan*) jangka panjang TIK dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis DJKN.
- KETIGA : Strategi TIK DJKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. peran, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis TIK;
  - b. prinsip implementasi Strategi TIK DJKN;
  - c. fokus area implementasi Strategi TIK DJKN; dan
  - d. rencana peta jalan (*roadmap*) implementasi Strategi TIK DJKN tiap fokus area periode tahun 2022-2026.
- KEEMPAT : Strategi TIK DJKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK di lingkungan DJKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Terhadap pelaksanaan strategi pada seluruh fokus area Strategi TIK DJKN dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Unit TIK DJKN paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- KEENAM : Strategi TIK DJKN dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dikaji ulang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau dalam hal diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
5. Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd.

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian Pengelolaan Barang  
Milik Negara, Rumah Tangga, dan Tata  
Usaha



Ditandatangani secara elektronik

Moh. Arif Rochman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
NOMOR 591/KN/2022  
TENTANG STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA TAHUN 2022-2026

## **I. STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2022-2026**

### **A. Latar Belakang**

Di era revolusi industri 4.0, digitalisasi memegang peranan penting dalam proses bisnis sebuah organisasi. Digitalisasi bertujuan untuk membangun ekosistem yang berisi elemen-elemen kehidupan yang saling menjalin hubungan timbal balik (Kasali, 2018). Empat elemen pokok digitalisasi sebagaimana dijelaskan oleh Rhenald Kasali dalam “The Great Shifting” diantaranya (1) *Mobile Internet*; (2) *Cloud Computing*; (3) *Internet of Thing*; dan (4) *Big Data dan Analytics-nya*. Dengan kata lain, Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah era dimana revolusi industri tahap lanjut dengan memanfaatkan TIK.

Pada mulanya peran TIK hanya sebagai pendukung proses bisnis (*business supporter*). Namun sekarang ini TIK diharapkan dapat berperan sebagai penggerak bisnis (*business enabler*). TIK memegang peranan penting dalam menciptakan ekosistem digital.

Dengan memanfaatkan TIK, proses bisnis yang manual ataupun semi-manual menjadi terdigitalisasi. Peran TIK membuat proses bisnis organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. Pada akhirnya, efisiensi dan efektivitas akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Tidak hanya organisasi sektor swasta (*private sector*), organisasi sektor pemerintahan (*public sector*) juga harus berupaya untuk meningkatkan produktivitas baik secara *output* maupun *outcome*. Produktivitas secara simultan juga dapat diciptakan dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan meningkat berbanding positif dengan meningkatnya kepuasan pengguna layanan.

Pemerintah Republik Indonesia menyadari pentingnya pemanfaatan TIK bagi peningkatan pelayanan publik. Pemerintah Republik Indonesia perlu mengatur tata kelola pelayanan publik berbasis TIK sehingga tercipta pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pedoman penyelenggaraan layanan publik dengan pemanfaatan TIK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai organisasi pelayanan publik selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik guna mewujudkan visinya sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Dengan kondisi tantangan ke depan, Kemenkeu perlu

mengambil langkah-langkah strategis dan signifikan guna mencapai visi di atas.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan meluncurkan program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sesuai dengan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 yang terdiri dari rumusan 87 inisiatif transformasi yang terbagi dalam 5 kelompok tema yaitu tema sentral, tema fiskal, tema penerimaan, tema belanja, serta tema perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan. Pada perkembangan selanjutnya, terdapat transformasi digital yang dimulai sejak tahun 2019 melalui 11 Program Inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, yang kemudian berkembang menjadi 41 Inisiatif Strategis di tahun 2022 dengan menerapkan dan mempertajam aspek digitalisasi.

Dalam melakukan transformasi digital, Kemenkeu menggunakan *Enterprise Architecture* (EA) sebagai tools utama menuju Kemenkeu modern yang berbasis digital. EA merupakan alat untuk membantu perencanaan strategis organisasi untuk mencapai visi dan misinya dengan memberikan kemampuan untuk melihat dan melakukan perbaikan pada bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan. Melalui EA, arsitektur organisasi Kemenkeu dapat diidentifikasi menjadi empat elemen utama yaitu arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data/informasi, dan arsitektur teknologi.

Selaras dengan langkah di atas, Kemenkeu menetapkan Panduan Umum Tata Kelola TIK sebagai acuan formal dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK untuk mendukung tugas Kemenkeu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang terpercaya dan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.1/2022 tentang Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan.

Pada pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 133/PMK.1/2022 tentang Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan disebutkan bahwa TIK berperan sebagai penggerak bisnis (*business enabler*) dan penopang (*backbone*) untuk memberikan nilai (*value creation*) dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan serta mewujudkan pemerintah digital. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 3 PMK 133/PMK.1/20122 tentang Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan, masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu menyusun Strategi TIK yang selaras dengan Strategi TIK Kementerian Keuangan untuk mendukung tujuan bisnis Unit Eselon I.

Untuk mewujudkan tujuan organisasi Kementerian Keuangan yang lebih efektif dan efisien melalui penyelarasan proses bisnis dengan TIK, Kementerian Keuangan menyusun Strategi TIK Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 241/KMK.01/2021 tentang Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan Tahun 2021-2024.

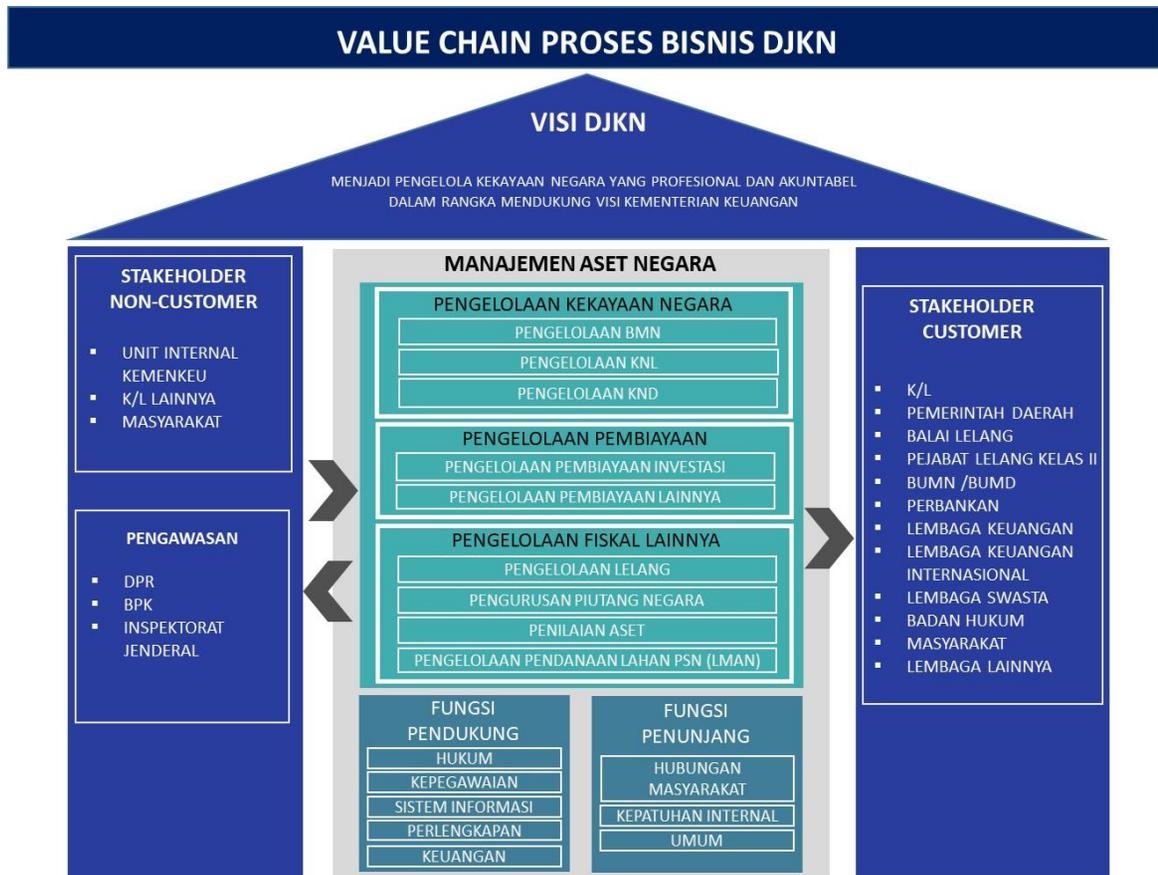
Diktum KESEPULUH Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/2021 tentang Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan Tahun 2021-2024 mengamanatkan bahwa masing unit TIK Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu menyusun strategi TIK dengan mengacu pada Strategi TIK Kementerian Keuangan.

Menindaklanjuti amanat tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) perlu menyusun Strategi TIK yang akan menjadi panduan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan TIK untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis TIK DJKN. Lebih lanjut, Strategi TIK DJKN akan menjadi pedoman, acuan, dan arah kebijakan TIK dalam proses perencanaan, perancangan, dan investasi TIK DJKN selama periode tahun 2022-2026. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, dokumen ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, teknologi terbaru serta dinamika organisasi sebagaimana kebijakan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Strategi TIK DJKN Tahun 2022-2026 juga akan menjabarkan Transformasi digital DJKN sebagaimana arah kebijakan *Roadmap DJKN to a Distinguished Asset Manager* guna mempertegas posisi strategis DJKN sebagai Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memanfaatkan penggunaan TIK secara efektif dan efisien.

## **B. Penjelasan Umum**

1. Visi DJKN yaitu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Untuk mendorong terwujudnya visi ini, DJKN melaksanakan serangkaian proses bisnis sebagaimana tergambar dalam Arsitektur Proses Bisnis pada *The Enterprise Architecture Ministry of Finance* (TEAM Finance).
3. Pada arsitektur proses bisnis pada TEAM Finance, proses bisnis DJKN dibedakan menjadi 3, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengelolaan Pembiayaan, dan Pengelolaan Fiskal lainnya.
4. Diagram *value chain* DJKN adalah model yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses bisnis pada DJKN secara spesifik, yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan DJKN.
5. Pada diagram *value chain* DJKN, proses bisnis DJKN dikelompokkan menjadi proses bisnis utama, proses bisnis pendukung dan proses bisnis penunjang. Sedangkan pemangku kepentingan dibedakan menjadi stakeholder *customer* dan stakeholder *non-customer*. Diagram *value chain* DJKN digambarkan sebagai berikut:



6. Strategi TIK DJKN menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK dengan kriteria sebagai berikut:
- adaptif, yaitu mudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini DJKN;
  - agile*, yaitu berfokus pada *outcome*; dan
  - kolaboratif, yaitu disusun dan diimplementasikan bersama dengan memperhatikan *concern* dari seluruh stakeholder terkait di lingkungan DJKN.

### C. Tujuan

Penyusunan Strategi TIK DJKN bertujuan untuk memberikan pedoman strategi pengelolaan TIK di lingkungan DJKN yang meliputi perencanaan, implementasi, pemanfaatan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi TIK guna mendukung terwujudnya visi dan misi DJKN.

### D. Pedoman dan Standar

Dalam penyusunan Strategi TIK DJKN, ada beberapa *best practice*, *framework*, dan standar yang digunakan sebagai pedoman, dan standar.

#### 1. *Best Practice* dan *Framework*

*Best practice* dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang telah terbukti paling efisien (memerlukan usaha paling minimal) dan efektif (menghasilkan *output* terbaik) untuk menyelesaikan suatu tugas dengan berdasarkan suatu prosedur yang telah digunakan oleh banyak orang/organisasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan *Framework* adalah adalah serangkaian pola/kerangka kerja yang mempercepat/mempermudah penyelesaian suatu pekerjaan. Beberapa

*best practice* dan *framework* yang digunakan dalam penyusunan Strategi TIK DJKN adalah sebagai berikut:

**a. *The Open Group Architecture Framework (TOGAF)***

TOGAF adalah *framework* dan *best practice* yang digunakan untuk membantu dalam proses penggambaran arsitektur organisasi, meliputi arsitektur proses bisnis, arsitektur sistem aplikasi, arsitektur data/informasi dan arsitektur teknologi. TOGAF dikembangkan oleh The Open Group dan telah digunakan di berbagai organisasi di seluruh dunia untuk menyusun *enterprise architecture*.

**b. *Control Objective for Information and related Technology (COBIT)***

COBIT adalah suatu *framework* dan *best practice* dalam proses perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan tata kelola TIK yang dibagi dalam 4 domain. COBIT dikembangkan oleh *IT Governance Institute (ITGI)* yang merupakan bagian dari *Information Systems Audit and Control Association (ISACA)* dan menjadi populer sebagai *framework* tata kelola TIK.

**c. *Information Technology Infrastructure Library (ITIL)***

ITIL merupakan salah satu *best practice* yang berisi konsep dan teknik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi manajemen layanan TIK. ITIL dikembangkan oleh *Office of Government Commerce (OGC)*.

**d. *Project Management Body of Knowledge (PMBOK)***

PMBOK berisi serangkaian pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan manajemen proyek. PMBOK diterbitkan oleh *Project Management Institute*.

**2. Standar**

Beberapa standar acuan dalam proses penyusunan Strategi TIK DJKN adalah sebagai berikut:

- b. SNI ISO/IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- c. SNI ISO/IEC 9001 Sistem Manajemen Mutu; dan
- d. SNI ISO/IEC 20000 Manajemen Layanan Teknologi Informasi.

## II. PERAN, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### A. Peran TIK

Sebagaimana amanat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, TIK berperan sebagai penggerak bisnis (*business enabler*) dan penopang (*backbone*) untuk memberikan nilai (*value creation*) dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta mewujudkan pemerintah digital. TIK dengan segala daya upayanya harus dapat menyediakan solusi layanan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN.

Kehadiran TIK di DJKN akan mendorong terjadinya perubahan proses bisnis, cara berpikir, dan cara bekerja menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Di sisi pelayanan, peran TIK harus dapat memotong dan mempersingkat rantai birokrasi dan proses pelayanan kepada para pengguna yang akan bermuara pada meningkatnya indeks kepuasan para pengguna layanan. Perkembangan TIK yang semakin pesat akan mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh para pimpinan DJKN melalui penyediaan data dan informasi yang valid, sehingga menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat.

### B. Visi TIK

Menjadi penggerak (*enabler*) dan *backbone* transformasi digital dalam mewujudkan DJKN sebagai pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.

### C. Misi TIK

- a. Menyelenggarakan layanan TIK yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pengguna;
- b. Menyediakan sistem aplikasi pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, dan penilaian yang andal dan terintegrasi untuk mewujudkan transformasi digital di DJKN;
- c. Mengembangkan pusat data pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, dan penilaian yang integratif, andal dan terpercaya untuk menghasilkan output berupa keputusan/tindakan, rekomendasi kebijakan, peringatan (*alert*), atau pengetahuan (*insight*);
- d. Mewujudkan tata kelola TIK yang sesuai *best practice*; dan
- e. Melaksanakan penguatan organisasi dan pengembangan kompetensi SDM TIK.

### D. Tujuan Strategis TIK

Tujuan strategis TIK yaitu terciptanya sistem informasi dalam rangka mewujudkan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien yang mampu menggerakkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta berkelanjutan dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

### E. Sasaran Strategis TIK

Sasaran strategis TIK merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis TIK, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan strategis TIK. Sasaran

strategis TIK dapat juga didefinisikan sebagai ukuran pencapaian dari tujuan strategis TIK. Sasaran strategis TIK DJKN digambarkan dalam pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC).

BSC adalah suatu kerangka kerja menyeluruh yang akan membantu para pimpinan dalam menterjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi suatu tujuan dengan capaian yang terukur (*measurable*) dalam empat perspektif, yaitu *financial perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*.

Dalam dokumen ini, sasaran strategis TIK DJKN akan digambarkan ke dalam empat *perspective*, yaitu:

1. *Customer perspective*,

*Customer Perspective* adalah tujuan spesifik apa yang akan dituju oleh TIK DJKN yang bertujuan untuk memberikan kepuasan layanan kepada para pengguna layanan. *Perspective* ini merupakan *perspective* utama yang harus dicapai untuk mendukung peran DJKN sebagai institusi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada para pengguna layanan.

2. *Stakeholder Perspective*,

*Stakeholder Perspective* adalah tujuan yang hendak dicapai oleh TIK DJKN yang bertujuan untuk mengakomodasi pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan DJKN. Para pemangku kepentingan DJKN diantaranya adalah unit organisasi internal Kementerian Keuangan, unit organisasi di luar Kementerian Keuangan dan lembaga pengawas internal dan eksternal.

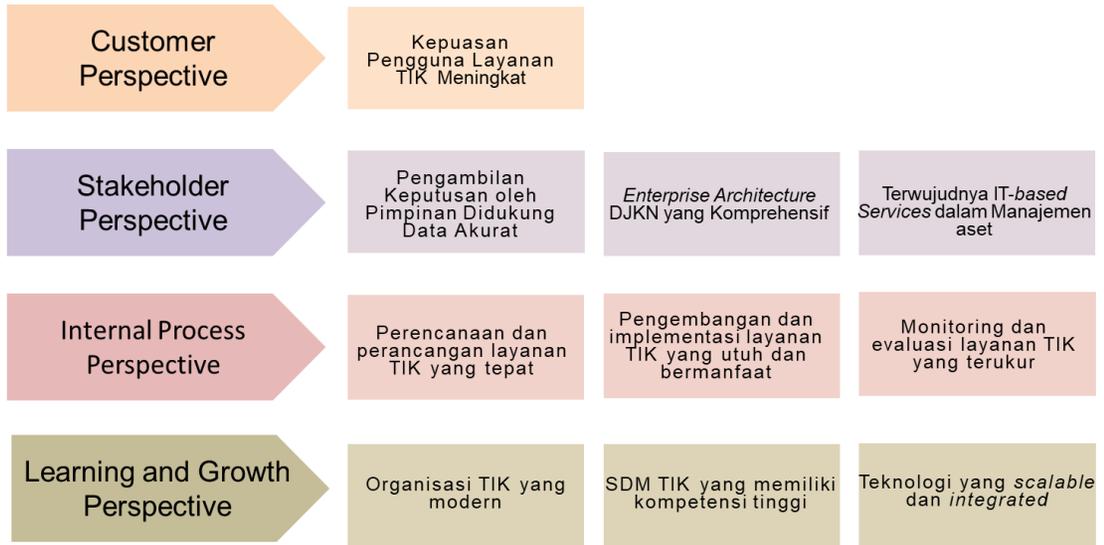
3. *Internal Process Perspective*,

*Internal Process Perspective* adalah serangkaian langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh unit TIK DJKN guna mendukung sasaran strategis pada *stakeholder perspective* dan *customer perspective*.

4. *Learning and Growth Perspective*,

*Learning and Growth Perspective* adalah modal dasar yang harus dimiliki oleh unit TIK DJKN untuk dapat mendukung pencapaian *internal process perspective*. Biasanya *perspective* ini berfokus pada *intangible assets*, sebagai contoh *skill* dan kapabilitas pegawai.

Sasaran strategis TIK DJKN untuk setiap perspektif dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:



### III. PRINSIP IMPLEMENTASI STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Prinsip implementasi Strategi TIK menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK.
2. Prinsip implementasi Strategi TIK terbagi dalam tujuh kelompok, yaitu:
  - a. Prinsip Umum

No	Prinsip	Keterangan
1	Efektif dan efisien	Pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK harus mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.
2	Interoperabilitas	Dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK perlu saling berbagi dan mengintegrasikan proses bisnis dan data/informasi baik dalam lingkup internal maupun eksternal DJKN.
3	Berorientasi pada pengguna	Tugas dan fungsi utama DJKN adalah memberikan layanan kepada para pengguna. Aspek pemenuhan kebutuhan, meringankan pekerjaan, dan kemudahan penggunaan merupakan aspek yang harus dipenuhi dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK di DJKN.
4	<i>Well governed</i>	Pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK harus memperhatikan dan memperkuat tata kelola yang ada.
5	Agile dan adaptif	Pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK mudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini DJKN yang menggabungkan kecepatan dan stabilitas dalam bekerja.
6	Kolaboratif	Pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK harus mendorong kolaborasi baik lingkup internal maupun eksternal.
7	Perbaikan berkelanjutan	Pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK harus terus dilakukan perbaikan seiring perubahan kebutuhan dan proses bisnis.

#### b. Prinsip Bisnis

No	Prinsip	Keterangan
1	Simplifikasi proses bisnis	TIK menjadi penggerak simplifikasi proses bisnis.
2	Digitalisasi proses bisnis	TIK menjadi penggerak digitalisasi proses bisnis.
3	<i>Reengineering</i> proses bisnis	TIK menjadi penggerak <i>reengineering</i> proses bisnis.
4	Percepatan waktu penyelesaian	TIK menjadi penggerak dalam mewujudkan percepatan waktu penyelesaian aktivitas proses bisnis.

## c. Prinsip Aplikasi

No	Prinsip	Keterangan
1	Terpusat	Dalam pengembangan aplikasi, perencanaan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi dilakukan secara terpusat oleh Unit TIK DJKN didampingi pemilik proses bisnis (Kantor Pusat dan/atau Kantor Vertikal) serta melalui koordinasi Unit TIK Kementerian Keuangan.
2	Tidak duplikasi	Dalam perencanaan dan pengembangan aplikasi harus dipastikan tidak adanya duplikasi sistem aplikasi maupun <i>re-entry data</i> dalam mendukung tugas dan fungsi yang sama.
3	Modularitas	Perencanaan dan pengembangan aplikasi mendukung konsep modular sehingga dapat digunakan secara <i>dependen</i> dan <i>independen</i> serta dapat di- <i>reuse</i> oleh aplikasi lainnya.
4	<i>Go green</i>	Perencanaan dan pengembangan aplikasi harus mendorong dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan.
5	<i>Multi platform</i>	Dalam perencanaan dan pengembangan aplikasi harus dipastikan bahwa aplikasi mendukung <i>multi platform access</i> .
6	<i>End User Computing</i>	Pengembangan sistem aplikasi oleh Unit Kerja Pengguna diperbolehkan sepanjang mengikuti ketentuan dalam pedoman pengelolaan <i>End User Computing</i> di lingkungan DJKN.
7	<i>Single user access</i>	Pengguna mengakses seluruh sistem aplikasi DJKN dengan menggunakan <i>single sign on</i> (SSO).

## d. Prinsip Data/Informasi

No	Prinsip	Keterangan
1	<i>Optimized Data</i>	Pengelolaan data perlu dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan manajerial dan operasional.
2	Integrasi Data	Pengelolaan data mengkombinasikan dengan berbagai data internal dan eksternal untuk mendukung kebutuhan manajerial dan operasional.
3	<i>Validated Data</i>	Pengelolaan data harus memastikan kebenaran setiap data.
4	<i>Single Source of Truth Data</i>	Adanya data tunggal yang menjadi rujukan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi di DJKN.

## e. Prinsip Infrastruktur dan Teknologi

No	Prinsip	Keterangan
1	Pemanfaatan teknologi yang tepat	Pengelolaan teknologi mempertimbangkan aspek kebutuhan organisasi, kemanfaatan, biaya, dan riset yang proaktif.
2	<i>Resource Sharing</i>	Pengelolaan teknologi harus mengedepankan penggunaan bersama atas suatu <i>resource</i> teknologi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan DJKN.
3	Standardisasi Teknologi	Pengelolaan teknologi mengacu pada standar teknologi yang dimiliki dan standar di luaran.
4	Mudah dikelola	Pengelolaan teknologi harus memperhatikan kemudahan dalam pengelolaan.
5	Dukungan Teknis Memadai	Pengelolaan teknologi harus didukung oleh ketersediaan dukungan teknis yang memadai dari pemilik ( <i>principal</i> ) teknologi tersebut.

## f. Prinsip Keamanan Informasi

No	Prinsip	Keterangan
1	Kerahasiaan ( <i>confidentiality</i> )	Perlunya memastikan bahwa aset informasi hanya dapat diakses oleh orang/pihak yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan.
2	Keutuhan ( <i>Integrity</i> )	Perlunya memastikan bahwa aset informasi tidak dimodifikasi tanpa ada izin pihak yang berwenang ( <i>authorized</i> ), menjaga keakuratan dan keutuhan informasi, serta metode prosesnya.
3	Ketersediaan ( <i>Availability</i> )	Perlunya memastikan bahwa aset informasi tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna yang berhak.

## g. Prinsip Layanan

No	Prinsip	Keterangan
1	Satu pintu	Perlunya memastikan bahwa pengguna dapat mengakses dan mengajukan layanan kepada DJKN melalui satu pintu/ <i>single portal</i> .
2	Berorientasi pengguna	Perlunya memastikan bahwa dalam proses pengembangan layanan DJKN berorientasi kepada pengguna secara mudah, transparan, cepat, akurat dan aman.

#### **IV. FOKUS AREA IMPLEMENTASI STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2022-2026**

Fokus area implementasi strategi TIK DJKN terbagi ke dalam tujuh area. Penjelasan untuk setiap fokus area implementasi strategi TIK DJKN tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

##### **A. Penguatan Peran, Organisasi, dan SDM TIK**

Penguatan peran, organisasi, dan SDM TIK menjadi hal yang perlu dilaksanakan dan menjadi salah satu fokus area pada implementasi strategi TIK DJKN. Hal ini dikarenakan dengan dukungan peran, organisasi, dan SDM TIK yang kuat maka proses implementasi strategi TIK dapat terlaksana dengan baik. Hasil identifikasi masalah terkait peran, organisasi, dan SDM TIK adalah sebagai berikut:

- 1) Sampai saat ini, peran TIK di DJKN adalah sebagai pendukung proses bisnis (*business supporter*).
- 2) Ada beberapa fungsi dan proses (sebagaimana ditentukan dalam peraturan dan *best practice* TIK) yang belum tercakup dalam struktur dan urjab pada unit TIK DJKN, sehingga fungsi dan proses tersebut tidak dilaksanakan.
- 3) Struktur organisasi ini belum sesuai dengan best practice yang ada (SDLC, COBIT 5, IT Infrastructure Library, TOGAF, dll) sehingga ada kemungkinan terjadi conflict of interest dan penumpukan pekerjaan pada seseorang/suatu unit. Sebagai contoh kegiatan pengembangan dan operasional sistem aplikasi masih dilaksanakan pada suatu unit yang sama, belum adanya unit kepatuhan dan audit TIK, belum adanya unit yang mengelola perubahan TIK.
- 4) Tim Komite Pengarah TIK (Tim KPTIK) yang terdiri dari pimpinan DJKN, perwakilan unit teknis DJKN, perwakilan Pusintek, dan perwakilan unit TIK DJKN belum berperan optimal terutama dalam pengambilan keputusan terkait investasi TIK dan mendukung sinergi kebijakan TIK dan kebijakan teknis.
- 5) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi memadai untuk melaksanakan beberapa tugas pengelolaan TIK, seperti pengelolaan strategi TIK, manajemen risiko TIK, *capacity management*, pengelolaan portofolio layanan TIK, pengolahan data, dan pengelolaan keamanan informasi.
- 6) Beberapa pekerjaan masih dilaksanakan oleh satu pegawai, sehingga sangat memberatkan pegawai yang bersangkutan dan adanya ketergantungan terhadap satu pegawai. Sebagai contoh dalam pengembangan sistem aplikasi beberapa fungsi *Business Analyst*, *Programmer*, *Quality Assurance*, dan layanan dukungan teknis dilaksanakan oleh pegawai yang sama.
- 7) *Knowledge management* untuk mendukung pengembangan kompetensi pegawai belum dilaksanakan dengan menyeluruh. *Knowledge* masih terpisah-pisah di masing-masing unit (belum terkompilasi dan terdokumentasi dengan baik).
- 8) Belum disusunnya profil kompetensi SDM TIK sebagai dasar penempatan pegawai dan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.

- 9) Terdapat SDM yang berlatar belakang pendidikan TIK namun ditugaskan di bidang lain selain TIK. Disisi lain, terdapat pegawai pada unit TIK Pusat DJKN yang tidak sesuai latarbelakangnya dan/atau bakat minatnya.
- 10) Jabatan Fungsional Pranata Komputer masih belum banyak diminati oleh SDM di DJKN.
- 11) SDM di kantor vertikal belum optimal dalam menunjang tugas dan fungsi di bidang TIK.

Beberapa inisiatif kegiatan yang perlu dilaksanakan pada fokus area penguatan peran, organisasi, dan SDM TIK DJKN adalah sebagai berikut:

Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan
Penguatan Peran, Organisasi, dan SDM TIK	Terwujudnya TIK sebagai penggerak bisnis ( <i>Business Enabler</i> ) serta organisasi TIK dan SDM yang kompeten	Penguatan Peran TIK	Penyusunan dokumen Strategi TIK DJKN
			Monitoring dan Evaluasi penerapan strategi TIK DJKN
			Pelaksanaan investasi TIK secara efisien dan efektif
			Mengoptimalkan peran Tim KPTIK DJKN dalam menentukan prioritas pekerjaan, investasi, dan kebijakan agar mendukung sinergi antara bisnis proses dan TIK.
			Tersusunnya <i>Enterprise Architecture</i> DJKN.
		Restrukturisasi Organisasi TIK	Penyusunan dokumen kajian
			Perancangan Nomenklatur dan Struktur Organisasi TIK DJKN
			Pengajuan Struktur Organisasi TIK DJKN
		Pengelolaan SDM TIK	Pemetaan Profil SDM TIK DJKN
			Penyusunan rencana pengembangan SDM TIK DJKN
Perancangan Pola Mutasi dan Jenjang karir SDM TIK			

## B. Simplifikasi, Reengineering, dan Integrasi Sistem Aplikasi

Simplifikasi, *reengineering*, dan integrasi sistem aplikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan,

memudahkan pengguna dalam penyelesaian pekerjaan, dan bermuara pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelesaian pekerjaan.

Simplifikasi, *reengineering*, dan integrasi sistem aplikasi juga dilaksanakan untuk menggantikan pelaksanaan proses bisnis yang masih manual dan/atau memproses dokumen secara fisik menjadi terdigitalisasi dan terotomasi melalui bantuan sistem aplikasi.

Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan asesmen ke semua unit Eselon II Kantor Pusat DJKN (sebagai unit teknis pemilik proses bisnis) untuk mendata dan mengidentifikasi proses bisnis DJKN yang masih dilaksanakan secara manual (belum menggunakan sistem aplikasi khusus/masih menggunakan aplikasi standar, contohnya Microsoft Office) dan/atau masih memproses dokumen fisik. Hasil identifikasi masalah terkait pengelolaan sistem aplikasi di DJKN adalah sebagai berikut:

- 1) DJKN memiliki proses bisnis yang beragam, sehingga sistem aplikasi yang dimiliki oleh DJKN sangat kompleks.
- 2) Perubahan kebijakan dan peraturan yang sangat cepat dan dinamis.
- 3) Belum adanya *roadmap* pengembangan dan integrasi sistem aplikasi di lingkungan DJKN.
- 4) Sistem aplikasi di DJKN masih terpisah-pisah antar satu dengan yang lainnya, belum sepenuhnya terintegrasi.
- 5) Masih ditemukan banyak kendala dalam melakukan simplifikasi, *reengineering*, dan integrasi sistem aplikasi di lingkungan DJKN, contohnya adanya perbedaan platform pemrograman, basis data, sistem operasi.
- 6) Masih terdapat duplikasi pengembangan dan pemanfaatan aplikasi yang mengakibatkan inefisiensi *resources*.
- 7) Adanya beberapa Unit Kerja Pengguna dan pegawai DJKN yang melaksanakan kegiatan pengembangan sistem aplikasi secara mandiri (*End User Computing*) tanpa berkoordinasi dengan Direktorat TSI sebagai Unit TIK DJKN.
- 8) Beberapa sistem aplikasi yang telah dikembangkan belum dipergunakan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN, misalnya karena belum adanya dasar hukum, perubahan proses bisnis dan kurangnya sosialisasi.
- 9) Sistem aplikasi yang telah dikembangkan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna baik dari aspek fungsional seperti fitur aplikasi, maupun non fungsional seperti performa, kemudahan, keamanan, dan lain-lain.
- 10) Kontribusi pengguna dan unit teknis sebagai Pemilik Proses Bisnis/*Business Process Owner* (BPO) dalam proses pengembangan sistem aplikasi belum optimal (mulai dari perencanaan, *requirement gathering*, konfirmasi di tahap desain dan pengembangan, pengujian aplikasi, hingga sosialisasi).
- 11) Dokumentasi kegiatan manajemen proyek dan pengembangan sistem aplikasi belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik.
- 12) *Platform* aplikasi, bahasa pemrograman, dan basis data DJKN masih beragam.
- 13) Metodologi pengembangan sistem aplikasi (SDLC, *agile programming*)

belum optimal.

Beberapa inisiatif kegiatan yang perlu dilaksanakan pada fokus area simplifikasi, *reengineering*, dan integrasi sistem aplikasi adalah sebagai berikut:

Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan
Simplifikasi, <i>reengineering</i> , dan integrasi sistem aplikasi	Terwujudnya sistem aplikasi yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pengguna	Simplifikasi proses bisnis	Perubahan/transformasi proses bisnis yang dapat mempersingkat waktu proses dan mendukung <i>job shifting</i> .
		Implementasi <i>Microservice</i>	Implementasi <i>Microservice</i> dalam pengembangan sistem aplikasi
		Implementasi <i>Service Oriented Architecture</i> (SOA)	Implementasi SOA dalam pengembangan sistem aplikasi DJKN dan penggunaan API untuk mendukung integrasi antar sistem aplikasi.
		Optimalisasi <i>Multiplatform</i>	Implementasi sistem aplikasi yang multi <i>platform</i> ( <i>web app</i> dan <i>mobile app</i> )
		Implementasi metodologi baru dalam pengembangan sistem aplikasi ( <i>agile</i> dan/atau <i>collaborative development</i> )	Implementasi metodologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan sistem aplikasi
		Implementasi standar pengembangan aplikasi	Penyusunan dan implementasi standar pengembangan sistem aplikasi sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem aplikasi DJKN
		Pengembangan <i>Super apps DJKN</i>	Pengembangan <i>Super apps</i> DJKN yang menampilkan semua layanan aplikasi DJKN kepada pengguna layanan.
		<i>Reengineering</i> sistem aplikasi	Pelaksanaan <i>reengineering</i> sistem aplikasi DJKN agar selaras dengan perkembangan teknologi dan proses bisnis DJKN.

### C. **Single Source of Truth (SSoT) Data Pengelolaan Kekayaan Negara**

SSoT adalah teknik pemusatan data pada satu sumber lokasi agar bisa diakses secara cepat, efektif, dan efisien. Dengan pemusatan data ini, semua orang dalam organisasi bisa mengakses data tunggal dengan cepat dan terbukti valid untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh para pimpinan (*data driven organisation*). Integrasi sistem aplikasi dilaksanakan pada lingkup internal DJKN, internal Kementerian Keuangan dan dengan unit lain di luar Kementerian Keuangan guna mewujudkan SSoT data pengelolaan kekayaan negara.

Lebih lanjut, di tataran Kementerian Keuangan SSoT data pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk mendukung implementasi interkoneksi data di lingkungan Kementerian Keuangan yang terpusat dan tervalidasi. Dengan adanya interkoneksi data ini, antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat saling tukar-menukar data sesuai dengan kebutuhannya melalui Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK).

SLDK adalah suatu sistem yang dimanfaatkan untuk mengelola kumpulan data Kementerian Keuangan agar terintegrasi dan teragregasi dalam rangka mewujudkan SSoT data Kementerian Keuangan. SLDK dimanfaatkan untuk mendukung tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Hasil identifikasi masalah terkait pengelolaan dan pengolahan data di DJKN adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya peraturan/kebijakan *Data Governance* di lingkungan DJKN khususnya terkait pembagian kewenangan dan tanggung jawab terkait data dan informasi.
- 2) Adanya duplikasi/redundansi data dari beberapa sumber (sistem aplikasi dan unit) yang berbeda sehingga validitas data DJKN belum dapat dipastikan keakuratannya.
- 3) Kegiatan pengolahan data DJKN menjadi informasi, *knowledge*, dan *insight* belum secara maksimal dilaksanakan oleh DJKN.
- 4) Proses pelaporan data pengelolaan kekayaan negara di DJKN oleh kantor vertikal belum sepenuhnya terotomasi dengan bantuan sistem aplikasi. Masih ada pelaporan yang memakai data yang diinputkan secara manual bukan berasal dari hasil proses otomasi, sehingga rawan terjadi *human error*.

Beberapa inisiatif kegiatan yang perlu dilaksanakan pada fokus area *single source of truth* data pengelolaan kekayaan negara adalah sebagai berikut:

Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan
------------	---------	----------	-----------------

<b>Fokus Area</b>	<b>Outcome</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Detail Kegiatan</b>
Single source of truth data pengelolaan kekayaan negara	Terwujudnya <i>single source of truth</i> data pengelolaan kekayaan negara untuk mewujudkan <i>data-driven organization</i>	Implementasi <i>Data Governance</i>	Penyusunan teknis pelaksanaan Tata Kelola Data di DJKN
		Pengembangan <i>Enterprise Data Model</i>	Penyusunan <i>Enterprise Data Model</i> DJKN yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan dan pengamanan data DJKN
		Pelaksanaan Integrasi Data	Melaksanakan integrasi data untuk mewujudkan pusat data kekayaan negara
		Optimalisasi <i>Data Warehouse</i>	Terwujudnya dan teroptimisasinya <i>Data Warehouse</i> DJKN
		<i>Executive Dashboard</i> terintegrasi	Pengembangan executive dashboard kekayaan negara yang terintegrasi
		Implementasi <i>Data Analytics</i>	Implementasi <i>Data Analytics</i> untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di DJKN dan mewujudkan <i>data-driven organization</i>
		<i>Leaders Talk Analytics</i>	<i>Talkshow</i> dengan menghadirkan narasumber Pimpinan untuk berbagi pengalaman dalam menumbuhkan budaya data di DJKN.
		<i>Showcase data analytics</i>	Kegiatan untuk memperlihatkan <i>impact data analytics</i> dalam bentuk studi kasus atau <i>project data analytics</i> baik dari Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal DJKN.

#### D. Pengelolaan Infrastruktur TIK

Infrastruktur TIK adalah suatu kombinasi atas sekumpulan perangkat

keras, perangkat lunak, jaringan komputer, fasilitas, dan lainnya yang mendukung dalam proses pengembangan, pengujian, implementasi, pemantauan, dan pengendalian layanan TIK pada suatu organisasi. Infrastruktur TIK terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Perangkat keras, yaitu perangkat fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data ke dalam bentuk informasi. Contoh infrastruktur TIK berupa perangkat keras adalah *server*, perangkat jaringan, *storage*, dan perangkat pengguna (PC, *smartphone*, *notebook*, tablet).
- b. Perangkat lunak, yaitu program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Contoh infrastruktur TIK berupa perangkat lunak antara lain sistem operasi, *middleware*, dan basis data.

Hasil identifikasi masalah terkait pengelolaan infrastruktur TIK di lingkungan DJKN adalah sebagai berikut:

- 1) Perangkat pengguna (*personal computer*, laptop, *notebook*, dan tablet) belum terkelola dan terkontrol dengan baik.
- 2) Belum semua *software* yang digunakan berlisensi resmi dan memiliki panduan/*user guide*/intruksi kerja.
- 3) Beberapa *software existing* yang digunakan belum *terupdate*, seperti *operating system*, antivirus, dll.
- 4) Terdapat perangkat server yang sudah tidak lagi diproduksi dipasaran (*discontinued*) dan berusia usang diatas 5 tahun (*obsolete*) serta penghentian masa garansi (*end of support*).
- 5) *Join domain* perangkat pengguna baik yang berstatus BMN maupun yang bukan belum sepenuhnya diimplementasikan di DJKN.
- 6) Beberapa unit kerja melaksanakan pemasangan jaringan komunikasi data di luar jaringan komunikasi data Kementerian Keuangan.
- 7) Adanya perangkat pengguna yang spesifikasinya tidak sesuai, usang, dan perlu dilakukan peremajaan.

Beberapa inisiatif kegiatan yang perlu dilaksanakan pada fokus area pengelolaan infrastruktur TIK adalah sebagai berikut:

<b>Fokus Area</b>	<b>Outcome</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Detail Kegiatan</b>
Pengelolaan Infrastruktur TIK	Terwujudnya pengelolaan infrastruktur TIK secara efektif dan efisien untuk mendukung layanan TIK yang handal	Pengelolaan <i>server server colocation dan migrasi ke data center Pusintek</i>	Pengelolaan <i>server</i> sistem aplikasi dan basis data DJKN yang berstatus <i>colocation</i> dan melakukan migrasi ke Smart data center Pusintek.
		Pengelolaan Perangkat keras dan Perangkat lunak (maintenance lisensi dan ATS)	Pengelolaan Perangkat keras dan Perangkat lunak (maintenance lisensi dan ATS).

Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan
		Optimalisasi Pengelolaan jaringan	Optimalisasi Pengelolaan jaringan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN.
		Pengelolaan perangkat pengguna	Pengelolaan perangkat pengguna meliputi <i>personal computer</i> , laptop, dan tablet.
		Pengelolaan perangkat <i>video conference</i>	Pengelolaan perangkat <i>video conference</i> DJKN sebagai pendukung komunikasi dan koordinasi antar unit.

### E. Penyempurnaan Tata Kelola TIK

Tata Kelola TIK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola organisasi, merupakan perwujudan tanggung jawab pimpinan organisasi melalui penerapan gaya kepemimpinan (*leadership*) yang kondusif, *accepted*, dan *servant*, dengan struktur organisasi dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa TIK dikelola secara optimal guna mendukung tujuan dan strategi organisasi. Tata kelola TIK merupakan kapasitas organisasi yang harus diperhatikan oleh pimpinan organisasi, manajemen proses bisnis dan manajemen TIK untuk menjamin keselarasan antara kebijakan proses bisnis dengan kebijakan TIK.

Keberadaan TIK menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari rencana strategis DJKN dan merupakan *enabler* bagi keseluruhan proses bisnis di lingkungan DJKN, yang dapat memberikan nilai lebih dan menghasilkan inovasi-inovasi bagi DJKN. Peran TIK sebagai *enabler* dan munculnya kesadaran bahwa tanggung jawab pengelolaan TIK di lingkungan DJKN menjadi tanggung jawab berbagai pihak di DJKN mendorong perlunya disusun suatu konsep pengelolaan TIK yang tepat guna memastikan optimalisasi fungsi TIK.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan menjadi faktor lain untuk segera disusun dan diterapkannya tata kelola TIK di DJKN. Hasil identifikasi masalah terkait tata kelola TIK di lingkungan DJKN adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya peraturan/kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelola TIK di lingkungan DJKN.
- 2) Masih adanya inisiatif kegiatan Tata Kelola TIK dan dokumentasi pelaksanaannya yang belum dilaksanakan, disusun, dan disosialisasikan.
- 3) Belum dilaksanakannya audit tata kelola TIK atau pengukuran IT *Maturity Level* secara berkala. Serta lemahnya pengawasan dan tindaklanjut atas hasil audit yang pernah dilaksanakan.
- 4) Kurangnya komitmen dari para pihak terkait tentang perlunya perbaikan

Tata Kelola TIK.

- 5) Belum optimalnya peran Tim KPTIK dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan terkait strategi dan inisiatif TIK.

Lebih lanjut, optimalnya peran TIK merupakan salah satu tujuan akhir yang hendak dicapai DJKN dalam *Roadmap DJKN to Distinguished Asset Manager 2019-2028*. Berkaca dari hal tersebut, DJKN perlu segera menyusun dan menerapkan pedoman tata kelola TIK DJKN sebagai kerangka panduan dan acuan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan TIK di DJKN. Beberapa inisiatif kegiatan yang perlu dilaksanakan pada fokus area penyempurnaan tata kelola TIK adalah sebagai berikut:

<b>Fokus Area</b>	<b>Outcome</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Detail Kegiatan</b>
Penyempurnaan Tata Kelola TIK	Terwujudnya tata kelola TIK untuk mendukung pengelolaan TIK DJKN secara efektif dan efisien	Penyusunan peraturan dan kebijakan tata kelola TIK	Penyusunan peraturan dan kebijakan terkait tata kelola TIK sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK di DJKN
		Implementasi peraturan dan kebijakan tata kelola TIK di lingkungan DJKN	Implementasi peraturan dan kebijakan tata kelola TIK di lingkungan DJKN
		<i>Monitoring</i> dan evaluasi implementasi peraturan dan kebijakan tata kelola TIK	<i>Monitoring</i> dan evaluasi implementasi peraturan dan kebijakan tata kelola TIK melalui kegiatan <i>assessment</i> dan/atau audit

#### **F. Pengelolaan keamanan informasi**

Perkembangan TIK yang semakin pesat juga diikuti dengan munculnya berbagai macam ancaman keamanan informasi diantaranya virus, *worm*, *ransomware*, *cracking*, DDOS, *phishing*, dan ancaman keamanan informasi lainnya. Berbagai ancaman keamanan informasi ini perlu diwaspadai dan ditanggulangi melalui serangkaian kegiatan penanggulangan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan. Kegiatan penanggulangan ancaman keamanan informasi meliputi perencanaan, implementasi, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan secara terus-menerus dengan melibatkan seluruh pihak terkait di lingkungan DJKN.

Secara umum kegiatan di atas bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi dari berbagai macam ancaman keamanan informasi dan menjaga agar tidak jatuh ke tangan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Hasil identifikasi masalah terkait pengelolaan keamanan informasi di lingkungan DJKN adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya peraturan/kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keamanan informasi di lingkungan DJKN.

- 2) DJKN belum melaksanakan serangkaian kegiatan manajemen risiko TIK, meliputi penyusunan, mitigasi, implementasi, pemantauan, dan evaluasi risiko TIK.
- 3) Meningkatnya jumlah ancaman keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal DJKN.
- 4) Data pengelolaan kekayaan negara memiliki daya tarik yang besar untuk disalahgunakan bagi keuntungan pribadi atau pihak ketiga lainnya (*data fraud*).
- 5) Belum semua aplikasi DJKN menerapkan sistem keamanan yang memadai, sehingga perlu adanya peningkatan, misalnya implementasi teknologi MFA, OTP, dll.
- 6) Belum adanya kontrol terhadap keamanan perangkat pengguna non BMN.
- 7) Standar keamanan perangkat TIK belum sepenuhnya diterapkan.
- 8) Belum semua pegawai aware dengan pentingnya menjaga keamanan informasi, sehingga perlu adanya kegiatan peningkatan security awareness contohnya pembuatan banner, pelaksanaan seminar, *knowledge sharing*, *workshop*, dll. Belum adanya unit dan SDM yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan keamanan informasi di lingkungan DJKN.
- 9) Tim Keamanan Informasi Kantor Pusat DJKN dan Kantor Vertikal belum berperan secara optimal.

Beberapa inisiatif kegiatan yang perlu dilaksanakan pada fokus area pengelolaan keamanan informasi adalah sebagai berikut:

<b>Fokus Area</b>	<b>Outcome</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Detail Kegiatan</b>
Pengelolaan keamanan informasi	Terjaganya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi DJKN dari berbagai ancaman keamanan informasi	Penyusunan peraturan dan kebijakan pengelolaan keamanan informasi	Penyusunan peraturan dan kebijakan terkait tata kelola TIK sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan keamanan informasi di DJKN
		Pelaksanaan manajemen risiko TIK	Pelaksanaan manajemen risiko TIK
		Implementasi peraturan dan kebijakan pengelolaan keamanan informasi	Implementasi peraturan dan kebijakan pengelolaan keamanan informasi
		Peningkatan <i>awareness</i> seluruh pegawai dan <i>stakeholder</i> terkait keamanan informasi	Peningkatan pemahaman dan <i>awareness</i> seluruh pegawai dan <i>stakeholder</i> DJKN terkait pentingnya menjaga keamanan informasi

Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan
		Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan keamanan informasi	Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan keamanan informasi
		Pelaksanaan Sertifikasi ISO 27001:2013	Pelaksanaan Sertifikasi ISO 27001 di lingkungan DJKN

### G. Optimalisasi Layanan Pengguna

Untuk mendukung pemberian layanan kepada pengguna, DJKN memanfaatkan Halo DJKN. Halo DJKN berfungsi sebagai *single point of contact* untuk menerima dan menyampaikan informasi, serta menerima permasalahan di bidang pengelolaan kekayaan negara dari dan/atau kepada pengguna layanan. Dalam proses implementasinya, Halo DJKN sebagai *single point of contact* layanan pengguna DJKN yang memerlukan dukungan SDM, proses, dan infrastruktur/teknologi. Hasil identifikasi masalah terkait layanan pengguna di lingkungan DJKN adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya peraturan/kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan layanan pengguna di lingkungan DJKN.
- 2) *Key Performance Indicator* (KPI) Direktorat TSI kurang merepresentasikan pengukuran kualitas layanan TIK.
- 3) *Service Catalogue* dan *Service Level Agreement* layanan TIK DJKN belum disosialisasikan secara menyeluruh ke seluruh pengguna layanan.

Beberapa inisiatif kegiatan yang perlu dilaksanakan pada fokus area penyempurnaan tata kelola TIK adalah sebagai berikut:

Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan
Optimalisasi layanan Pengguna	Terwujudnya Layanan Pengguna yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada pengguna	Penyusunan peraturan dan kebijakan manajemen mutu dan layanan TIK	Penyusunan peraturan dan kebijakan sesuai dengan <i>best practice</i> dan standar sebagai pedoman dalam kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK.
		implementasi peraturan dan kebijakan manajemen mutu dan layanan TIK	Implementasi peraturan dan kebijakan manajemen mutu dan layanan TIK di lingkungan DJKN
		monitoring dan evaluasi implementasi manajemen mutu dan layanan TIK	Monitoring dan evaluasi implementasi manajemen mutu dan layanan TIK

<b>Fokus Area</b>	<b>Outcome</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Detail Kegiatan</b>
		Pelaksanaan Assessmen terhadap kapabilitas manajemen mutu dan layanan TIK	Pelaksanaan Assessmen terhadap kapabilitas manajemen mutu dan layanan TIK
		Pelaksanaan Sertifikasi ISO 20000 dan ISO 9001	Pelaksanaan Sertifikasi ISO 20000 dan ISO 9001
		Optimalisasi Halo DJKN sebagai <i>Single Point of Contact</i> Layanan TIK DJKN	Optimalisasi Halo DJKN sebagai <i>Single Point of Contact</i> Layanan TIK DJKN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

V. RENCANA PETA JALAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI TIAP FOKUS AREA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2022-2026

No	Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan
1	Penguatan Peran, Organisasi, dan SDM TIK	Terwujudnya TIK sebagai penggerak bisnis ( <i>Business Enabler</i> ) serta organisasi TIK dan SDM yang kompeten	Penguatan Peran TIK	Penyusunan dokumen Strategi TIK DJKN.	Dokumen Strategi TIK DJKN	Subdit TILO	2022
				Monitoring dan Evaluasi penerapan strategi TIK DJKN.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Strategi TIK DJKN	Subdit TILO	setiap tahun akhir
				Pelaksanaan investasi TIK secara efisien dan efektif.	Dokumen <i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi</i> TIK DJKN	Subdit TILO	sepanjang tahun
				Mengoptimalkan peran Tim KPTIK dalam menentukan prioritas pekerjaan, investasi, dan kebijakan agar mendukung sinergi antara bisnis proses dan TIK.	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim KPTIK DJKN	Subdit TILO dan Subdit PISA	sepanjang tahun
				Tersusunnya <i>Enterprise Architecture</i> DJKN.	<i>Enterprise Architecture</i> DJKN	Sekretariat DJKN dan Direktorat TSI	2022-2026
			Restrukturisasi Organisasi TIK	Penyusunan dokumen kajian.	Dokumen Kajian Restrukturisasi Organisasi TIK DJKN	Subdit TILO	2024-2025

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-28-

No	Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan
				Perancangan Nomenklatur dan Struktur Organisasi TIK DJKN.	Dokumen Rancangan Nomenklatur dan Struktur Organisasi TIK DJKN	Subdit TILO	2024-2025
				Pengajuan Struktur Organisasi TIK DJKN.	Rancangan Struktur Organisasi TIK yang sesuai dengan kondisi terkini dan <i>best practice</i>	Subdit TILO	2025-2026
			Pengelolaan SDM TIK	Pemetaan Profil SDM TIK DJKN.	Profil SDM TIK DJKN	Subdit TILO dan Sekretariat DJKN	2022
				Penyusunan rencana pengembangan SDM TIK DJKN.	Dokumen Rencana Pengembangan SDM TIK DJKN	Subdit TILO dan Sekretariat DJKN	setiap tahun
				Perancangan Pola Mutasi dan Jenjang karir SDM TIK.	Dokumen Rancangan Pola Mutasi dan Karir SDM TIK DJKN	Subdit TILO dan Sekretariat DJKN	2023-2024
			2	Simplifikasi, <i>reengineering</i> , dan integrasi sistem aplikasi	Terwujudnya sistem aplikasi yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pengguna	Simplifikasi proses bisnis	Perubahan/transformatasi proses bisnis yang dapat mempersingkat waktu proses dan mendukung job shifting.

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-29-

No	Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan
			Implementasi <i>Microservice</i>	Implementasi <i>Microservice</i> dalam pengembangan sistem aplikasi	Sistem aplikasi berbasis <i>microservice</i>	Subdit PISA dan Subdit TILO	2022-2026
			Implementasi <i>Service Oriented Architecture (SOA)</i>	Implementasi SOA dalam pengembangan sistem aplikasi DJKN	Sistem aplikasi berbasis SOA	Subdit PISA	2022-2026
			Optimalisasi <i>Multiplatform</i>	Implementasi sistem aplikasi yang <i>multi platform (web app dan mobile app)</i>	Sistem aplikasi DJKN dapat diakses oleh pengguna dengan baik pada perangkat <i>personal computer, laptop, dan mobile</i>	Subdit PISA	2022-2026
			Implementasi metodologi baru dalam pengembangan sistem aplikasi ( <i>agile dan/atau collaborative development</i> )	Implementasi metodologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan sistem aplikasi	Laporan pengembangan sistem aplikasi yang menerapkan metodologi baru	Subdit PISA	2023

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-30-

No	Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan
			Implementasi standar pengembangan aplikasi	Penyusunan dan implementasi standar pengembangan sistem aplikasi sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem aplikasi DJKN	Dokumen standar pengembangan sistem aplikasi	Subdit PISA dan Subdit TILO	2023
			Pengembangan Super apps DJKN	Pengembangan Super apps DJKN yang menampilkan semua layanan aplikasi DJKN kepada pengguna layanan.	Super apps DJKN	Subdit PISA	2022-2023
			<i>Reengineering</i> sistem aplikasi	Pelaksanaan <i>reengineering</i> sistem aplikasi DJKN agar selaras dengan perkembangan teknologi dan proses bisnis DJKN.	Sistem aplikasi yang selaras dengan perkembangan teknologi dan proses bisnis DJKN	Subdit PISA	2022-2023
3	Terwujudnya <i>single source of truth</i> data kekayaan negara	Terwujudnya <i>single source of truth</i> data pengelolaan kekayaan negara	Implementasi <i>Data Governance</i>	Penyusunan kebijakan dan implementasi <i>data governance</i> di DJKN	Kebijakan <i>Data Governance</i>	Subdit TILO	2022

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-31-

No	Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan
		untuk mewujudkan <i>data-driven organization</i>	Pengembangan <i>Enterprise Data Model</i>	Penyusunan <i>Enterprise Data Model</i> DJKN yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan dan pengamanan data DJKN	Dokumen <i>Enterprise Data Model</i> DJKN	Subdit TILO	2022-2023
			Pelaksanaan Integrasi Data	Melaksanakan integrasi data untuk mewujudkan Pusat Data kekayaan negara	Laporan Pelaksanaan Integrasi Data	Subdit TILO dan Subdit PISA	2023-2024
			Optimalisasi <i>Data Warehouse</i>	Terwujudnya dan teroptimisasinya <i>Data Warehouse</i> DJKN	Laporan Implementasi <i>Data Warehouse</i>	Subdit TILO dan Subdit PISA	2022-2026
			<i>Executive Dashboard</i> terintegrasi	Pengembangan <i>executive dashboard</i> kekayaan negara yang terintegrasi	Laporan pengembangan dan implementasi <i>Executive Dashboard</i> terintegrasi	Subdit TILO dan Subdit PISA	2023-2024
			Implementasi <i>Data Analytics</i>	Implementasi <i>Data Analytics</i> untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di DJKN dan mewujudkan <i>data-driven organization</i>	Knowledge dan insight untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan kekayaan negara di DJKN dalam bentuk	Subdit TILO dan Subdit TBAD	2022-2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-32-

No	Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan
					tabel, <i>chart</i> , tren, dll.		
			<i>Leaders Talk Analytics</i> tentang <i>Data Analytics</i>	<i>Talkshow</i> dengan menghadirkan narasumber Pimpinan untuk berbagi pengalaman dalam menumbuhkan budaya data di DJKN.	Laporan pelaksanaan kegiatan	Subdit TILO dan Subdit TBAD	Setiap tahun
			<i>Showcase data analytics</i>	Kegiatan untuk memperlihatkan manfaat <i>data analytics</i> dalam bentuk studi kasus atau <i>project data analytics</i> baik dari Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal DJKN.	Laporan pelaksanaan kegiatan	Subdit TILO dan Subdit TBAD	2023
4	Pengelolaan Infrastruktur TIK	Terwujudnya pengelolaan infrastruktur TIK secara efektif dan efisien untuk mendukung layanan TIK yang handal	Pengelolaan <i>server colocation</i>	pengelolaan server sistem aplikasi dan basis data DJKN yang berstatus <i>colocation</i> .	Laporan <i>termination/ migrasi server</i> sistem aplikasi dan basis data ke <i>Data Center</i> Kemenkeu	Subdit TILO	2023
			Pengelolaan Perangkat keras dan Perangkat lunak	Pengelolaan Perangkat keras dan Perangkat lunak.	laporan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak	Subdit TILO	2022-2026

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-33-

No	Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan
			Optimalisasi Pengelolaan jaringan	Optimalisasi Pengelolaan jaringan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN.	laporan pengelolaan jaringan	Subdit TILO	2022-2026
			Pengelolaan perangkat pengguna	Pengelolaan perangkat pengguna meliputi <i>personal computer</i> , laptop, dan tablet.	laporan pengelolaan perangkat pengguna	Bagian PBMNRTTU	2022-2026
			Pengelolaan perangkat <i>video conference</i>	Pengelolaan perangkat video conference DJKN sebagai pendukung komunikasi dan koordinasi antar unit.	Laporan pengelolaan dan optimalisasi perangkat <i>video conference</i> DJKN	Subdit TILO	2022-2026
5	Penyempurnaan Tata Kelola TIK	Terwujudnya tata kelola TIK untuk mendukung pengelolaan TIK DJKN secara efektif dan efisien	Penyusunan peraturan dan kebijakan tata kelola TIK	Penyusunan peraturan dan kebijakan terkait tata kelola TIK sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK.	Dokumen rancangan peraturan dan kebijakan terkait tata kelola TIK	Subdit TILO	2022
			Implementasi peraturan dan kebijakan tata kelola TIK di lingkungan DJKN	Implementasi peraturan dan kebijakan tata kelola TIK di lingkungan DJKN.	Laporan implementasi	Subdit TILO	2022-2026

No	Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan
			<i>Monitoring</i> dan evaluasi implementasi peraturan dan kebijakan tata kelola TIK	<i>Monitoring</i> dan evaluasi implementasi peraturan dan kebijakan tata kelola TIK melalui kegiatan <i>assessmen</i> dan/atau audit.	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi	Subdit TILO	setiap tahun
6	Pengelolaan keamanan informasi	Terjaganya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi DJKN dari berbagai ancaman keamanan informasi	Penyusunan peraturan dan kebijakan pengelolaan keamanan informasi	Penyusunan peraturan dan kebijakan terkait tata kelola TIK sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan keamanan informasi di DJKN.	Dokumen rancangan peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan keamanan informasi	Subdit TILO	2022
			Pelaksanaan manajemen risiko TIK	Pelaksanaan manajemen risiko TIK.	Dokumen Manajemen Risiko TIK	Subdit TILO dan Subdit PISA	setiap tahun
			implementasi peraturan dan kebijakan pengelolaan keamanan informasi	Implementasi peraturan dan kebijakan pengelolaan keamanan informasi.	Laporan implementasi	Subdit TILO dan Subdit PISA	2022-2026

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-35-

No	Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan
			Peningkatan <i>awareness</i> seluruh pegawai dan stakeholder terkait keamanan informasi	Peningkatan pemahaman dan <i>awareness</i> seluruh pegawai dan stakeholder DJKN terkait pentingnya menjaga keamanan informasi.	Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan	Subdit TILO dan Sekretariat DJKN	setiap tahun
			monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan keamanan informasi	monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan keamanan informasi.	laporan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan keamanan informasi	Subdit TILO dan Sekretariat DJKN	setiap tahun akhir
			Pelaksanaan Sertifikasi ISO 27001:2013	Pelaksanaan Sertifikasi ISO 27001 di lingkungan DJKN.	Sertifikat ISO 27001	Subdit TILO	2023-2024
7	Optimalisasi layanan Pengguna	Terwujudnya Layanan Pengguna yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada pengguna	Penyusunan peraturan dan kebijakan manajemen mutu dan layanan TIK	Penyusunan peraturan dan kebijakan sesuai dengan <i>best practice</i> dan standar sebagai pedoman dalam kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK.	Dokumen rancangan peraturan dan kebijakan terkait manajemen mutu dan layanan TIK	Subdit TILO	2022

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-36-

No	Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan
			Implementasi peraturan dan kebijakan manajemen mutu dan layanan TIK	Implementasi peraturan dan kebijakan manajemen mutu dan layanan TIK di lingkungan DJKN.	Laporan implementasi	Subdit TILO	2022-2026
			<i>Monitoring</i> dan evaluasi implementasi manajemen mutu dan layanan TIK	<i>Monitoring</i> dan evaluasi implementasi manajemen mutu dan layanan TIK.	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi manajemen mutu dan layanan TIK	Subdit TILO	setiap tahun akhir
			Pelaksanaan Assessmen terhadap kapabilitas manajemen mutu dan layanan TIK	Pelaksanaan Assessmen terhadap kapabilitas manajemen mutu dan layanan TIK.	Laporan Assessmen kapabilitas manajemen mutu dan layanan TIK	Subdit TILO	setiap tahun akhir
			Pelaksanaan Sertifikasi ISO 20000 dan ISO 9001	Pelaksanaan Sertifikasi ISO 20000 dan ISO 9001.	Sertifikat ISO 20000 dan ISO 9001	Subdit TILO	2022-2023

No	Fokus Area	Outcome	Kegiatan	Detail Kegiatan	Output	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan
			Optimalisasi Halo DJKN sebagai <i>Single Point of Contact</i> Layanan TIK DJKN	Optimalisasi Halo DJKN sebagai <i>Single Point of Contact</i> Layanan TIK DJKN.	Laporan optimalisasi Halo DJKN sebagai <i>Single Point of Contact</i> Layanan TIK	Subdit TILO, Sekretariat DJKN, Dit. Huhu	2022-2026

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Direktorat Jenderal  
 u.b. Kepala Bagian Pengelolaan Barang  
 Milik Negara, Rumah Tangga, dan Tata  
 Usaha

Ttd.

RIONALD SILABAN



Ditandatangani secara elektronik

Moh. Arif Rochman

